PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
Jalan Pelajar No.01 Harapan Jaya, Natuna, Kepulauan Riau 29762
Pos.El : kecamatanbungurantengah@gmail.com

GAMBARAN KONDISI WILAYAH SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN SKP.A KECAMATAN BUNGURAN TENGAH TAHUN 2026

Desa Harapan Jaya • Desa Tapau • Desa Air Lengit
Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau

Disusun sebagai bahan profil wilayah, perencanaan pengembangan kawasan, dan pemutakhiran data spasial serta nonspasial

Catatan :
Dokumen ini disusun berdasarkan sekilas kondisi lapangan saat ini sebagai Gambaran tentang kondisi di wilayah SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah dan juga mengacu pada Dokumen RKT, Rencana Penggunaan Lahan dan Kabupaten Natuna dalam Angka Tahun 2025. Dan bila ada yang lebih sesuai dan detail dapat ditambahkan atau di update atau dikonfirmasikan untuk perbaikan.

DOKUMEN GAMBARAN KONDISI WILAYAH
SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (SKP) A BUNGURAN TENGAH

Desa Harapan Jaya • Desa Tapau • Desa Air Lengit
Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau

Disusun sebagai bahan profil wilayah, perencanaan pengembangan kawasan, dan pemutakhiran data spasial serta nonspasial

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2026

Disusun Oleh : Kartono, SE
Kepala Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial

Peserta PKA XII BPSDM Kepri Tahun 2026

Catatan :
Dokumen ini disusun berdasarkan sekilas kondisi lapangan saat ini sebagai Gambaran tentang kondisi di wilayah SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah dan juga mengacu pada Dokumen RKT, Rencana Penggunaan Lahan dan Kabupaten Natuna dalam Angka Tahun 2025. Dan bila ada yang lebih sesuai dan detail dapat ditambahkan atau di update atau dikonfirmasikan untuk perbaikan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini menyajikan gambaran kondisi wilayah SKP.A Bunguran Tengah yang secara historis meliputi tiga satuan permukiman transmigrasi: SP.1 Desa Harapan Jaya, SP.2 Desa Tapau, dan SP.3 Desa Air Lengit. Dokumen disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Penggunaan Lahan Usaha II Transmigran SKP.B Batubi (yang memuat informasi historis SKP.A), Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Bunguran Jaya Tahun 2025, dan Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025.

Data historis menyebut luas SKP.A sekitar 5.260 ha untuk tiga SP/desa, dengan rincian Harapan Jaya sekitar 1.760 ha, Tapau 1.719,860 ha, dan Air Lengit 1.780,140 ha. Sementara itu sesuai dengan luasan 3 Satuan Permukiman Transmigrasi dalam Satuan Kawasan Pengembangan (SKP.A) yang dibentuk tahun 1979, sedangkan dokumen RKT Bunguran Jaya Tahun 2025 mencatat wilayah administratif ketiga desa yang masuk dalam delineasi RKT pada SKP yang dalam dokumen RKT disebut SKP D seluas 8.255,40 ha karena dalam rencana pengembangan sesuai dengan Rencana Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya Kabupaten Natuna yang akan ditetapkan Kembali bahwa SKP.A direncanakan menjadi SKP.D dengan menambah luasan areal pada HPL Murni dengan rencana menambah 2 Aatuan Permukiman Transmigrasi di Lahan HPL Transmigrasi sehingga luasannya menjadi 8.255,40 Ha. Kedua angka tersebut mempunyai konteks dan batas pengukuran berbeda sehingga tidak boleh dipertukarkan karena wilayahnya masih tetap tetapi bertambah luasan disampingnya dan masih dalam HPL Transmigrasi.

Secara umum, wilayah Kecamatan Bunguran Tengah memiliki bentang lahan dari datar hingga bergelombang. Peta sistem lahan dan data tingkat kecamatan menunjukkan jenis tanah ***Kambisol Gleiik, Kambisol Distrik, dan Podsolik Haplik***. Dokumen terdahulu juga mencatat keberadaan Bendung Tapau dan saluran irigasi primer sepanjang kurang lebih 12 km yang dibangun pada tahun 2001 oleh BWSS IV untuk mendukung pertanian. Informasi tersebut menunjukkan potensi pengembangan pertanian, tetapi kinerja jaringan irigasi, kondisi tanah per bidang, kondisi drainase, dan kesesuaian komoditas perlu diidentifikasi di lapangan secara detail sehingga berkesinambungan antara tujuan, fungsi dan angan – angan terhadap terbangunnya Bendungan Tapau, Saluran Irigasi, Rencana sawah dan para petaninya dengan dukungan yang kuat oleh Pemerintah Desa, pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah, BWSS dan instansi terkait lainnya di daerah dan di Pusat.

Dokumen ini merupakan profil awal berbasis sumber yang tersedia, bukan pengganti survei tanah, pengukuran batas, pemeriksaan status hak, atau kajian teknis rinci. Angka dan

uraian yang bersumber dari cakupan Kabupaten Natuna atau seluruh RKT harus dibaca sebagai konteks regional, bukan otomatis mewakili setiap bidang di SKP.A.

DAFTAR ISI

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Profil dan Sejarah SKP.A Bunguran Tengah
- BAB III. Kondisi Geografis dan Administratif
- BAB IV. Kondisi Fisik Wilayah dan Tanah
- BAB V. Iklim, Hidrologi, dan Sumber Daya Air
- BAB VI. Penggunaan Lahan, Tata Ruang, dan Status Penguasaan
- BAB VII. Kependudukan, Sosial, Ekonomi, dan Pertanian
- BAB VIII. Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas
- BAB IX. Potensi, Permasalahan, dan Risiko Pengembangan
- BAB X. Arahan Pengelolaan dan Rekomendasi
- BAB XI. Data yang Perlu Dilengkapi dan Diverifikasi
- Daftar Sumber

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah SKP.A Bunguran Tengah merupakan kawasan eks permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi desa definitif. Informasi mengenai kondisi geografis, fisik lahan, jenis tanah, sumber daya air, penggunaan lahan, kependudukan, sarana prasarana, serta status penguasaan tanah diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan, penataan ruang, pengembangan pertanian, pengelolaan aset, dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan profil ini diperlukan agar data dasar yang selama ini tersebar dalam dokumen perencanaan, data statistik, dan catatan sektoral dapat dihimpun menjadi satu rujukan awal. Profil juga membantu membedakan data historis kawasan transmigrasi dari batas administrasi desa dan delineasi kawasan dalam RKT Bunguran Jaya Tahun 2025. Dari segi pemahaman kadang dianggap sama tetapi sangat berbeda antara batas desa, batas Satuan Permukiman dan delinasi RKT.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen adalah menyediakan gambaran terpadu mengenai kondisi wilayah SKP.A Bunguran Tengah berdasarkan dokumen yang tersedia.

1. Menguraikan letak, cakupan desa, sejarah pembentukan, dan perkembangan kawasan.
2. Merangkum kondisi topografi, geologi, jenis tanah, iklim, hidrologi, dan potensi sumber daya alam.
3. Menyajikan informasi awal mengenai penggunaan lahan, status penguasaan, penduduk, ekonomi, pertanian, dan infrastruktur.
4. Mengidentifikasi potensi, kendala, risiko, dan kebutuhan data lanjutan untuk mendukung perencanaan.
5. Menjadi dasar awal penyusunan basis data spasial dan nonspasial SKP.A.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup Desa Harapan Jaya, Desa Tapau, dan Desa Air Lengit dalam konteks historis SKP.A Bunguran Tengah, serta keterkaitannya dengan delineasi RKT Bunguran Jaya Tahun 2025 yang wilayahnya masih sama sesuai luasan dan batas HPL Transmgrasi yang berada dibeberapa kecamatan di pulau bunguran besar. Uraian kabupaten dan kecamatan dipakai sebagai konteks regional. Data yang tidak tersedia secara spesifik untuk SKP.A dinyatakan sebagai data yang perlu diverifikasi.

1.3. Metode dan Batasan Data

- Telaah dokumen: Rencana Penggunaan Lahan Usaha II Transmigran SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3; Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya Tahun 2025; dan Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025.
- Penyandingan angka dilakukan berdasarkan konteks dan satuan yang disebut dalam dokumen sumber.
- Informasi jenis tanah dan sistem lahan yang tersedia berskala tinjau/regional tidak digunakan untuk menetapkan kondisi satu bidang tanah.
- Batas administrasi, batas historis SKP.A, batas HPL, batas kawasan hutan, dan batas delineasi RKT harus diverifikasi melalui peta resmi serta pengukuran/overlay GIS.

BAB II. PROFIL DAN SEJARAH SKP.A BUNGURAN TENGAH

2.1. Cakupan Wilayah

SKP.A Bunguran Tengah secara historis terdiri atas tiga satuan permukiman yang saat ini menjadi desa definitif, yaitu SP.1 Desa Harapan Jaya, SP.2 Desa Tapau, dan SP.3 Desa Air Lengit. Dokumen Rencana Penggunaan Lahan Usaha II SKP.B Batubi memuat uraian sejarah dan luasan ketiga desa

No.	SP/Desa	Luas historis yang dicatat	Keterangan
1	SP.1 – Desa Harapan Jaya	± 1.760 ha	Bagian dari SKP.A historis
2	SP.2 – Desa Tapau	± 1.719,860 ha	Bagian dari SKP.A historis
3	SP.3 – Desa Air Lengit	± 1.780,140 ha	Bagian dari SKP.A historis
	Jumlah	± 5.260 ha	Angka historis menurut dokumen sumber

2.2. Sejarah Permukiman Transmigrasi

Menurut dokumen sumber, pembangunan SKP.A dilaksanakan pada periode sekitar 1979–1982. Penempatan transmigran berlangsung pada awal dekade 1980-an, dengan rincian yang dicatat dalam dokumen sebagai berikut:

SP/Desa	Jumlah KK awal yang dicatat	Periode penempatan dalam dokumen
SP.1 Desa Harapan Jaya	350 KK	1983–1984 (pada tabel historis disebut 1981/1982)
SP.2 Desa Tapau	275 KK	1984–1985 (pada tabel historis disebut 1982/1983)
SP.3 Desa Air Lengit	325 KK	1984–1985 (pada tabel historis disebut 1982/1983)

Catatan: dokumen memuat perbedaan tahun penempatan antara uraian dan tabel. Untuk naskah resmi, tahun penempatan per desa perlu dikonfirmasi melalui arsip penempatan transmigran dan berita acara serah terima. Dokumen juga menyebut serah terima unit permukiman transmigrasi pada 26 Februari 1994 dengan jumlah 573 KK dan 2.517 jiwa.

2.3. Perkembangan Infrastruktur Pertanian

Dokumen historis menyebut pembangunan Bendung Tapau dan saluran irigasi primer sepanjang sekitar 12 km pada tahun 2001 dengan tujuan mendukung pengembangan lahan pertanian dan persawahan. Dokumen yang sama mencatat bahwa jaringan tersebut belum sepenuhnya dapat diandalkan sebagai penyangga produksi pangan. Kondisi fisik bendung, saluran primer dan sekunder, bangunan pembagi, cakupan layanan, serta kontinuitas air perlu diperiksa kembali.

2.4 Perbedaan Angka Luas dan Nomenklatur

Konteks pengukuran	Angka yang tercatat	Makna dan catatan
SKP.A historis, tiga SP/desa	± 5.260 ha	Jumlah luasan SP.1, SP.2, SP.3 sebagaimana dicatat dalam dokumen historis.
Delineasi RKT Bunguran Jaya 2025 untuk tiga desa di Kecamatan Bunguran Tengah	8.255,40 ha	Dalam tabel RKT disebut sebagai bagian SKP D; terdiri dari Tapau 2.223,59 ha, Harapan Jaya 2.446,96 ha, dan Air Lengit 1.759,84 ha, dengan total tabel juga mencakup desa lain pada SKP D untuk SP baru.

Penting: angka 5.260 ha dan 8.255,40 ha tidak boleh dianggap saling menggantikan. Dokumen RKT mencatat luasan bagian desa yang masuk delineasi kawasan perencanaan, sedangkan angka 5.260 ha merujuk pada luasan historis tiga satuan permukiman transmigrasi.

BAB III. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

3.1. Letak dan Kedudukan Wilayah

SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah, Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen historis menggambarkan Bunguran Tengah berada di bagian tengah Pulau Bunguran Besar dan relatif dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten. Jarak sekitar 7 km dari Kantor Bupati Natuna disebut dalam dokumen lama; angka ini perlu diperiksa kembali berdasarkan titik asal, tujuan, dan jaringan jalan yang digunakan.

3.2. Desa dalam Cakupan

No.	Desa	Kode desa dalam dokumen RKT	Luas bagian desa yang masuk delineasi RKT 2025
1	Tapau	21.03.16.2001	2.223,59 ha
2	Harapan Jaya	21.03.16.2002	2.446,96 ha
3	Air Lengit	21.03.16.2003	1.759,84 ha

Angka per desa di atas berasal dari tabel delineasi RKT Bunguran Jaya 2025. Total luasan untuk ketiga baris tersebut adalah 6.430,39 ha, bukan 8.255,40 ha. Dalam tabel sumber, angka 8.255,40 ha untuk SKP D juga mencakup Desa Binjai, Sungai Ulu, dan Batu Gajah yang sebagian masuk delineasi karena adanya batas desa yang selalu dan sering berubah. Oleh karena itu, 8.255,40 ha adalah total SKP D dalam delineasi RKT dan masih dalam HPL Transmigrasi kearah Binjai, bukan hanya jumlah tiga desa SKP.A historis.

3.3. Posisi dalam Rencana Kawasan Transmigrasi

Dokumen RKT Bunguran Jaya Tahun 2025 memasukkan sebagian wilayah Desa Tapau, Harapan Jaya, dan Air Lengit ke dalam SKP D. Dalam arahan pengembangan, Harapan Jaya disebut sebagai pusat SKP, sementara Tapau dan Air Lengit diarahkan untuk fungsi permukiman, perdagangan dan pertanian. Dokumen tersebut juga menyebut arahan pemugaran permukiman dan perbaikan/pembangunan sarana-prasarana serta fasilitas sosial dan umum.

3.4. Batas Wilayah

Batas administrasi masing-masing desa tidak dirinci lengkap dalam sumber yang tersedia pada tingkat yang cukup untuk dijadikan batas legal atau batas operasional. Batas Satuan Kawasan Pengembangan (SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah secara administrasi berbeda dengan Batas wilayah RKT.

Secara astronomis kantor Kecamatan Bunguran Tengah terletak pada 3°52'15,51″ LU, 108°17'17,33″ BT. **Secara geografis**, batas-batas wilayah Kecamatan Bunguran Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Kecamatan Bunguran Timur Laut**;
2. Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Kecamatan Bunguran Timur**;
3. Sebelah **Barat** berbasatan dengan **Kecamatan Bunguran Batubi**; dan
4. Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kecamatan Bunguran Timur**.

Sementara batas wilayah SKP.A dan dalam RKT menjadi SKP.D secara geografis batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Kecamatan Bunguran Timur Laut**;
2. Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Kecamatan Bunguran Timur**;
3. Sebelah **Barat** berbasatan dengan **Kecamatan Bunguran Batubi**; dan
4. Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kecamatan Bunguran Timur**.

Luas daratan Kecamatan Bunguran Tengah sekitar **85,83 km^2.** Kecamatan ini terdiri dari tiga desa yaitu **Desa Harapan Jaya, Tapau, dan Air Lengit**. **Desa Air Lengit** adalah desa yang wilayahnya **paling luas** yaitu sekitar **33,43 km^2** atau sekitar **38,95 %** dari luas wilayah kecamatan. Sementara **Desa Tapau** adalah desa dengan luas wilayah **paling kecil** yaitu sekitar **25,51 km^2** atau sekitar **29,72 %**.

BAB IV. KONDISI FISIK WILAYAH DAN TANAH

4.1. Topografi dan Bentuk Lahan

Dokumen RKT Bunguran Jaya 2025 menjelaskan bahwa kawasan RKT secara umum didominasi lahan datar sampai berombak dengan kemiringan 0–15 persen. Namun angka tersebut adalah statistik seluruh lokasi studi RKT seluas 32.638,10 ha termasuk rencana pengembangan wilayah SKP.B Kecamatan Bunguran Batubi dan seluruh HPL Transmigrasi, bukan hasil tabulasi khusus SKP.A. Tabel kemiringan lahan SKP A tersedia dalam dokumen RKT dan perlu diolah/diekstrak dari peta atau tabel rinci untuk memperoleh distribusi kelas lereng khusus area SKP.A.

Aspek	Informasi sumber	Interpretasi awal untuk SKP.A
Bentuk wilayah	RKT secara umum: datar sampai berombak/bergelombang; mayoritas lereng 0–15%.	Dapat menjadi konteks awal, tetapi distribusi lereng tiga desa harus dipetakan secara spesifik.
Ketinggian	RKT secara umum membentang dari dataran rendah hingga sekitar 160 mdpl pada lokasi studi; angka kabupaten lebih luas.	Elevasi lokal perlu diambil dari DEM/topografi dan diverifikasi lapangan.
Drainase	RKT mencatat variasi drainase dari terhambat hingga baik, termasuk beberapa lahan rawa/gambut di kawasan studi.	Lokasi genangan, saluran dan titik rawan banjir perlu dipetakan di tiap desa.
Erosi/lereng	Risiko erosi meningkat pada lereng lebih curam dan lahan terbuka; dokumen RKT menyebut potensi longsor lokal akibat curah hujan tinggi.	Perlu identifikasi lokasi lereng curam, tebing sungai, dan pembukaan lahan.

4.2. Geologi dan Bahan Induk

Dokumen RKT menjelaskan bahwa kawasan perencanaan Bunguran Jaya memiliki beberapa formasi geologi. Formasi Raharjaputra (Tpr) merupakan formasi luas pada kawasan RKT secara keseluruhan, tersusun antara lain oleh batu pasir gampingan, batu lempung karbonan, dan konglomerat. Informasi ini merupakan konteks geologi regional; tanpa overlay peta geologi pada batas SKP.A, formasi yang tepat pada masing-masing desa atau bidang tidak dapat ditetapkan secara pasti.

4.3. Jenis Tanah

Tabel sebaran jenis tanah berdasarkan kecamatan dalam dokumen RKT Bunguran Jaya mencatat tiga kelompok jenis tanah untuk Kecamatan Bunguran Tengah: Kambisol Gleiik, Kambisol Distrik, dan Podsolik Haplik. Pemetaan tersebut merujuk pada Peta Sistem Lahan skala 1:250.000 Lembar Natuna dan hasil pengolahan data. Skala tersebut sesuai untuk gambaran awal wilayah, tetapi tidak cukup untuk menentukan sifat tanah pada setiap bidang.

Nama tanah dalam sumber	**Gambaran umum untuk perencanaan**	**Hal yang perlu diuji**
Kambisol Gleiik	Berpotensi menunjukkan pengaruh kejenuhan air atau kondisi drainase pada bagian tertentu.	Kedalaman muka air, lama genangan, tekstur, pH, dan kondisi drainase.
Kambisol Distrik	Tanah berkembang dengan karakter yang bervariasi; produktivitas bergantung pada sifat kimia-fisik dan pengelolaan.	pH, bahan organik, unsur hara, kedalaman efektif, tekstur.
Podsolik Haplik	Dapat memiliki reaksi tanah masam dan kesuburan alami terbatas; perlu pengelolaan sesuai hasil uji.	pH, kejenuhan basa, Al dapat ditukar, bahan organik, unsur hara.

Penjelasan umum pada tabel merupakan interpretasi agronomis awal, bukan hasil pengujian laboratorium untuk SKP.A. Dokumen sumber tidak memberikan hasil uji laboratorium tanah yang rinci per desa atau per bidang.

4.4. Tekstur, Kedalaman Efektif, pH, dan Kesuburan

Dokumen RKT menyebut pada kawasan perencanaan secara keseluruhan terdapat variasi tekstur tanah, kedalaman efektif, drainase, dan reaksi tanah. Sebagian lahan kawasan studi memiliki pH rendah dan kesuburan alami terbatas. Nilai spesifik untuk SKP.A tidak tersedia secara pasti dalam ringkasan sumber, sehingga dokumen ini tidak menetapkan satu angka pH, tekstur, atau kedalaman efektif sebagai nilai rata-rata SKP.A.

4.5. Kesesuaian Lahan dan Implikasi Pemanfaatan

Penilaian kesesuaian lahan harus menghubungkan kebutuhan tumbuh komoditas dengan kondisi lereng, drainase, kedalaman tanah, pH, ketersediaan air, dan risiko lingkungan. Dokumen RKT memberikan analisis kesesuaian pada skala kawasan, tetapi rekomendasi komoditas di SKP.A perlu diperiksa terhadap tabel kesesuaian per komoditas dan peta unit lahan yang bersinggungan dengan ketiga desa.

- Lahan datar dan memiliki drainase memadai dapat dipertimbangkan untuk tanaman pangan atau penggunaan budidaya lain setelah uji tanah dan air.
- Lahan dengan drainase buruk atau genangan musiman memerlukan penataan drainase yang tidak mengganggu aliran alami dan kawasan lindung.
- Lahan dengan kemiringan lebih besar memerlukan konservasi tanah, penutup lahan, teras sesuai kondisi, dan pembatasan pembukaan lahan.
- Penggunaan lahan pada sempadan sungai, kawasan hutan, dan area yang memiliki pembatasan tata ruang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB V. IKLIM, HIDROLOGI, DAN SUMBER DAYA AIR

5.1. Iklim

Dokumen RKT memperoleh data iklim dari Stasiun Meteorologi Kelas III/Ranai di Bandara Raden Sadjad untuk periode 2017–2024. Data tersebut mewakili konteks iklim regional Natuna dan bukan pengukuran khusus di masing-masing desa SKP.A. Unsur yang digunakan dalam dokumen meliputi curah hujan, jumlah hari hujan, suhu minimum/maksimum, kecepatan angin, kelembapan, penyinaran matahari, dan tekanan udara.

Untuk profil teknis SKP.A, data iklim sebaiknya disajikan dalam tabel bulanan berdasarkan publikasi BMKG/BPS yang berlaku, dilengkapi ringkasan bulan basah-kering dan implikasinya terhadap kalender tanam. Angka rinci bulanan perlu disalin dari tabel iklim dalam RKT/BPS sebelum dokumen ditetapkan agar tidak terjadi salah kutip.

5.2. Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai

Dokumen RKT membahas sumber daya air dan daerah aliran sungai pada skala kawasan Bunguran Jaya. Informasi yang tersedia belum cukup untuk menetapkan secara rinci seluruh nama sungai, mata air, daerah genangan, dan batas DAS khusus SKP.A. Inventarisasi hidrologi lokal perlu memetakan sungai, parit, saluran irigasi, kolam/tampungan, sumur, titik banjir, dan lokasi sumber air baku.

5.3. Bendung Tapau dan Jaringan Irigasi

Dokumen historis SKP.A mencatat Bendung Tapau dan saluran irigasi primer sekitar 12 km yang dibangun pada 2001. Infrastruktur ini berpotensi menjadi penunjang pertanian, namun fungsi aktualnya harus ditentukan melalui pemeriksaan teknis: kondisi bendung, sedimentasi, kebocoran, kerusakan saluran, bangunan bagi, kontinuitas debit, cakupan layanan, serta kelompok pengguna air.

5.4. Kualitas dan Perlindungan Air

- Lakukan pemeriksaan kualitas air pada sumber yang digunakan masyarakat dan kegiatan pertanian, terutama pada lokasi yang dekat dengan permukiman, kegiatan usaha, atau potensi pencemaran.
- Jaga fungsi sempadan sungai dan saluran; hindari pembuangan sampah, limbah domestik, serta bahan kimia pertanian secara langsung ke badan air.

- Petakan lokasi yang mengalami genangan atau kekeringan musiman sebagai dasar perbaikan drainase dan pengaturan kalender tanam.

BAB VI. PENGGUNAAN LAHAN, TATA RUANG, DAN STATUS PENGUASAAN

6.1. Penggunaan Lahan

Secara historis, pola transmigrasi SKP.A adalah TPLK (Tanaman Pangan Lahan Kering). Dokumen lama menyebut bahwa seiring perkembangan, sebagian masyarakat mengombinasikan tanaman pangan lahan kering dengan tanaman perkebunan seperti karet. Data penggunaan lahan terkini yang terukur per kelas—permukiman, sawah, kebun, tegalan, hutan/vegetasi, fasilitas umum, badan air, dan lahan tidak produktif—belum tersedia secara lengkap dalam sumber yang ditelaah.

6.2. Status HPL dan Legalitas Tanah

Dokumen historis mencatat SKP.A berada pada beberapa HPL transmigrasi, termasuk SK HPL Nomor 61/HPL/DA/82, Nomor 97/HPL/DA/83, Nomor 70/HPL/BPN/96, dan Nomor 30/HPL/BPN/97. Dokumen tersebut memuat rincian sebaran luasan historis pada masing-masing satuan permukiman. Namun penentuan status bidang saat ini harus menggunakan buku tanah, surat ukur, sertifikat, peta bidang, keputusan HPL, dan informasi resmi Kantor Pertanahan.

Dokumen sumber juga menyebut proses pengurusan dan penerbitan sertifikat untuk sebagian lahan transmigran di SKP.A pada periode 2022–2025 serta program PTSL lanjutan di tahun 2026 dan tahun berikutnya. Rincian tersebut merupakan catatan historis dan harus diperbarui dengan data resmi terbaru per desa.

6.3. Tata Ruang dan Kawasan Hutan

RKT Bunguran Jaya Tahun 2025 menjadi rujukan perencanaan kawasan dan memasukkan sebagian wilayah ketiga desa ke dalam delineasi kawasan. Meskipun demikian, delineasi RKT tidak dengan sendirinya membuktikan status hak atas tanah atau mengubah status kawasan hutan. Setiap rencana pemanfaatan harus diperiksa terhadap RTRW, peta kawasan hutan terbaru, peta HPL, peta bidang tanah, dan ketentuan perizinan yang berlaku.

6.4. Kebutuhan Basis Data Spasial

- Peta batas administrasi desa dan batas historis SKP.A.
- Peta delineasi RKT Bunguran Jaya dan pusat-pusat pelayanan.
- Peta HPL, kawasan hutan, APL, sertifikat dan bidang tanah.
- Peta penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang.
- Peta topografi, kemiringan, jenis tanah, sistem lahan, hidrologi, serta jaringan jalan dan irigasi.

BAB VII. KEPENDUDUKAN, SOSIAL, EKONOMI, DAN PERTANIAN

7.1. Kependudukan

Dokumen historis mencatat jumlah penduduk gabungan tiga desa SKP.A pada Januari 2024 sebanyak 3.818 jiwa dan 1.203 KK, dengan rincian berikut. Angka tersebut perlu diperbarui menggunakan data administrasi kependudukan dan/atau publikasi statistik terbaru sebelum digunakan sebagai angka resmi.

Desa	KK (Januari 2024)	Penduduk (Januari 2024)
Harapan Jaya	528	1.658 jiwa
Tapau	332	1.053 jiwa
Air Lengit	343	1.107 jiwa
Jumlah	1.203	3.818 jiwa

Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025 mencatat jumlah penduduk Kecamatan Bunguran Tengah sekitar 4,09 ribu jiwa pada 2024, laju pertumbuhan tahunan 2020–2024 sebesar 2,22 persen, dan rasio jenis kelamin 106,00. Angka kecamatan ini mencakup seluruh wilayah kecamatan dan tidak sama dengan jumlah tiga desa historis SKP.A.

7.2. Kondisi Sosial dan Pelayanan

Kebutuhan layanan dasar yang perlu dipetakan meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelayanan pemerintahan desa, air minum, sanitasi, persampahan, akses komunikasi, serta ruang publik. Sumber yang ditelaah belum menyajikan inventaris lengkap jumlah, kapasitas, kondisi bangunan, dan radius layanan fasilitas untuk setiap desa SKP.A yang ada hanya bangunan asset transmigrasi yang sudah kondisi using di setiap desa yang

perlu adanya perbaikan, pemeliharaan dan Sebagian perlu revitasilsasi sehingga layak untuk pelayanan dasar. Kondisi Jalan Utama sudah bagus karena sudah lapis Aspal Hotmix, sementara kondisi jalan lingkungan masih rata – rata jalan tanah, ada Sebagian jalan yang sudah beraspal hotmix dan lapis penetrasi macadam tetapi baru terhitung 9 % dari keseluruhan jalan lingkungan di seluruh wilayah SKP.A Bunguran Tengah. Kenapa SKP.A perlu dimasukkan dalam wilayah RKT, wilayah SKP.A Kecamatan Bunguran Tengah merupakad desa Eks. Transmigrasi dan untuk pengembangan perlu adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga desa eks. Transmigrasi di wilayah SKP.A dapat diprioritaskan Pembangunan dan pengembangan sebagai SP Tempatan, SP.Pugar, SP Baru dan Pusat Perkotaan Baru, sehingga semua bangunan, jalan dan fasilitas umum lainnya dapat di tangani Kembali dan dapat dilakukan penataan penduduk.

7.3. Ekonomi Lokal dan Mata Pencaharian

Dokumen historis menggambarkan SKP.A sebagai wilayah dengan basis pertanian dan potensi pengembangan pangan. Pola usaha yang disebut mencakup tanaman pangan lahan kering serta sebagian tanaman perkebunan. Profil ekonomi terbaru perlu dilengkapi dengan data rumah tangga tani, luas panen, produktivitas, komoditas utama, ternak, usaha mikro, akses pasar, harga input-output, kelembagaan tani, serta sumber pendapatan nonpertanian.

7.4. Potensi Pertanian

- Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura pada lahan yang sesuai, didukung uji tanah, akses air, dan kalender tanam.
- Optimalisasi jaringan irigasi Bendung Tapau setelah audit teknis dan pemetaan cakupan layanan.
- Pengembangan kebun/perkebunan berdasarkan kesesuaian lahan, ketersediaan pasar, dan praktik konservasi tanah.
- Penguatan kelompok tani, penyuluhan, pengolahan pascapanen, penyimpanan, dan konektivitas ke pasar.

BAB VIII. SARANA, PRASARANA, DAN AKSESIBILITAS

8.1. Jaringan Jalan dan Transportasi

Dokumen sumber menekankan posisi Bunguran Tengah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten. Kondisi Jalan Utama sudah bagus karena sudah lapis Aspal Hotmix, sementara kondisi jalan lingkungan masih rata – rata jalan tanah, ada Sebagian jalan yang sudah beraspal hotmix dan lapis penetrasi macadam tetapi baru terhitung 9 % dari keseluruhan jalan lingkungan di seluruh wilayah SKP.A Bunguran Tengah, sementara yang sangat menyedihkan berdasarkan kondisi aktual setiap ruas jalan desa, jalan usaha tani, jembatan, gorong-gorong, dan akses menuju lahan perlu mendapat perhatian khusus, karena merupakan urat nadi kehidupan para Masyarakat eks. Transmigrant dalam aktifitasnya sebagai petani dan memiliki pengaruk utama pada ekonomi, kesejahteraan dan kemandirian Masyarakat dan desa.

8.2. Irigasi, Drainase, dan Air Bersih

Bendung Tapau dan jaringan irigasi merupakan prasarana penting yang memerlukan penilaian fungsi aktual. Selain irigasi, perlu dicatat sistem drainase permukiman dan pertanian, sumber air minum, sumur, tampungan air, kualitas air, dan cakupan rumah tangga yang terlayani dan perlu perhatian khusus.

8.3. Sarana Sosial dan Ekonomi

Inventarisasi sarana perlu mencakup sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor desa, pasar/warung, gudang atau tempat pengumpulan hasil pertanian, balai pertemuan, sarana olahraga, serta fasilitas produksi dan pascapanen. Setiap aset sebaiknya dilengkapi titik koordinat, status kepemilikan, kondisi fisik, kapasitas, pengelola, dan kebutuhan rehabilitasi. Selain itu perlu juga legalitas asset yang jelas karena sudah serahterima pembinaan, serahterima wilayah dan serahterima asset dari Kementerian Transmigrasi, maka Pemerintah Daerah perlu menyelesaikan legalitas asset dan penilaian agar Pemerintah Desa pada saat akan renivasi, pemeliharaan, revitalisasi dan lainnya jelas statusnya, jelan penggunanya, jelas kepemilikannya dan jelan manfaatnya.

8.4. Telekomunikasi dan Energi

Ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi perlu didokumentasikan melalui data operator/instansi teknis serta survei sinyal di lokasi permukiman dan lahan produksi. Peta

blank spot atau gangguan layanan akan membantu perencanaan layanan digital dan sistem informasi kawasan.

BAB IX. POTENSI, PERMASALAHAN, DAN RISIKO PENGEMBANGAN

Aspek	Potensi/kekuatan	Permasalahan/risiko yang perlu diperiksa
Lokasi dan akses	Berada di Pulau Bunguran Besar dan relatif dekat pusat pemerintahan kabupaten menurut dokumen historis.	Kualitas jalan dan akses ke lahan produksi belum terinventarisasi secara rinci.
Pertanian	Basis pertanian dan sejarah pola TPLK; ada Bendung Tapau dan jaringan irigasi.	Fungsi irigasi belum optimal menurut catatan historis; produktivitas dan cakupan layanan perlu data terbaru.
Tanah	Terdapat variasi jenis tanah yang memungkinkan pengembangan sesuai kondisi lokasi.	pH, kesuburan, drainase dan kesesuaian komoditas per bidang belum teruji secara rinci.
Legalitas lahan	Terdapat riwayat HPL dan program sertifikasi/pendaftaran tanah.	Perlu pemutakhiran status sertifikat, peta bidang, tumpang tindih, dan batas kawasan.
Perencanaan kawasan	Tiga desa masuk dalam cakupan perencanaan RKT Bunguran Jaya.	Perbedaan batas historis SKP, batas desa, HPL, dan delineasi RKT dapat menimbulkan salah tafsir.
Lingkungan	Sumber daya lahan dan air dapat mendukung kegiatan budidaya yang sesuai.	Potensi genangan, drainase buruk, erosi pada lereng, pencemaran air, dan gangguan sempadan perlu pemetaan.

9.1. Analisis Singkat

Pengembangan SKP.A perlu dimulai dari penyatuan basis data dan kepastian batas, bukan hanya dari penetapan komoditas. Data dasar yang konsisten akan membantu menentukan lahan mana yang dapat dibudidayakan, lahan yang perlu konservasi, lokasi yang memerlukan perbaikan irigasi/drainase, dan bidang yang memerlukan penyelesaian administrasi pertanahan.

9.2. Risiko Utama

- Risiko perbedaan luasan akibat penggunaan batas historis SKP, batas administrasi desa, HPL, dan delineasi RKT yang berbeda.
- Risiko rekomendasi budidaya tidak sesuai jika data jenis tanah regional diperlakukan sebagai data bidang.
- Risiko kerusakan atau tidak optimalnya jaringan irigasi apabila rehabilitasi dilakukan tanpa audit teknis dan rencana operasi-pemeliharaan.
- Risiko konflik pemanfaatan ruang apabila status hak, kawasan hutan, sempadan, dan peruntukan ruang tidak diverifikasi.
- Risiko penurunan kualitas lingkungan akibat erosi, drainase tidak memadai, atau pencemaran sumber air.

BAB X. ARAHAN PENGELOLAAN DAN REKOMENDASI

10.1. Prioritas Jangka Pendek

1. Membentuk tim lintas perangkat daerah untuk konsolidasi data wilayah SKP.A.
2. Menyusun satu peta kerja yang menampilkan batas desa, batas historis SKP.A, delineasi RKT, HPL, kawasan hutan, bidang sertifikat, penggunaan lahan, jalan, sungai dan irigasi.
3. Memutakhirkan data penduduk, KK, pemanfaatan lahan, kepemilikan/sertifikasi, sarana-prasarana dan kelompok tani per desa.
4. Melakukan survei cepat kondisi Bendung Tapau, saluran primer/sekunder, drainase, jalan usaha tani dan titik genangan.
5. Menandai setiap angka dengan tahun data, sumber, skala, definisi, dan cakupan wilayah.

10.2. Prioritas Jangka Menengah

1. Melakukan survei tanah representatif dan pengujian laboratorium pada zona penggunaan lahan yang berbeda.
2. Menyusun peta kelas lereng, unit lahan, drainase, kesesuaian komoditas, dan risiko lingkungan untuk masing-masing desa.
3. Menyusun rencana rehabilitasi irigasi berdasarkan audit teknis, prioritas layanan, dan kesepakatan pengelolaan air.
4. Mengembangkan sistem informasi wilayah berbasis GIS yang menghubungkan data spasial dan nonspasial.
5. Menyusun rencana pengembangan ekonomi pertanian yang memperhitungkan akses pasar, pascapanen, kelembagaan dan kemampuan petani.

10.3. Prinsip Pengelolaan

- Berbasis data dan bukti lapangan.
- Memastikan kesesuaian dengan RTRW, status tanah, dan ketentuan kawasan hutan.
- Mengutamakan konservasi tanah, air, sempadan sungai, dan fungsi lingkungan.
- Melibatkan pemerintah desa, kelompok tani, masyarakat, dan instansi teknis terkait.
- Memutakhirkan data secara berkala dan menyediakan metadata yang jelas.

BAB XI. DATA YANG PERLU DILENGKAPI DAN DIVERIFIKASI

No.	Data yang dibutuhkan	Rincian minimum	Sumber/instansi yang disarankan
1	Batas dan luas	Batas desa, batas historis SKP.A, batas RKT, luas per poligon, sistem koordinat dan skala peta.	Bappeda, Bagian Pemerintahan, pemerintah desa, ATR/BPN.
2	Status tanah	Nomor HPL, sertifikat, surat ukur, NIB/peta bidang, bidang belum bersertifikat, sengketa/overlap.	Kantor Pertanahan, Disnakertrans, pemerintah desa.
3	Topografi	DEM, elevasi, kelas lereng 0–3, 3–8, 8–15, 15–25, 25–40, >40 persen.	Bappeda/PUPR, BIG atau sumber geospasial resmi.
4	Tanah	Jenis tanah, tekstur, kedalaman efektif, pH, bahan organik, unsur hara, drainase, titik sampel.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, laboratorium tanah.

5	Iklim	Curah hujan bulanan, hari hujan, suhu, kelembapan, angin, sumber dan periode data.	BMKG, BPS.
6	Hidrologi	Sungai, DAS, mata air, sumur, genangan, banjir, debit dan kualitas air.	PUPR, DLH, desa, instansi sumber daya air.
7	Irigasi	Kondisi bendung, panjang saluran, kerusakan, luas layanan, debit, jadwal distribusi, pengelola.	PUPR, kelompok P3A, Dinas Pertanian.
8	Penggunaan lahan	Permukiman, sawah, kebun, tegalan, hutan/vegetasi, fasilitas, lahan terlantar.	Dinas teknis, pemerintah desa, citra satelit dan survei lapangan.
9	Kependudukan	Penduduk dan KK per desa, umur, pekerjaan, rumah tangga tani, migrasi.	Disdukcapil, BPS, pemerintah desa.
10	Ekonomi pertanian	Komoditas, luas tanam/panen, produksi, produktivitas, harga, pemasaran, kelompok tani.	Dinas Pertanian, BPS, penyuluh, kelompok tani.
11	Infrastruktur	Jalan, jembatan, sekolah, kesehatan, air minum, sanitasi, listrik, sinyal, aset desa.	PUPR, OPD terkait, pemerintah desa.
12	Lingkungan dan risiko	Erosi, longsor, kebakaran, genangan, sempadan, kualitas air dan titik pencemaran.	BPBD, DLH, PUPR, pemerintah desa.

Format Metadata Minimum

Setiap dataset sebaiknya memuat: nama data, definisi, cakupan geografis, tahun/periode data, sumber/instansi, tanggal pengumpulan, metode, skala/resolusi, sistem koordinat untuk data spasial, penanggung jawab, tingkat validasi, serta catatan keterbatasan.

PENUTUP

SKP.A Bunguran Tengah memiliki sejarah panjang sebagai kawasan permukiman transmigrasi dengan basis pertanian dan dukungan infrastruktur air berupa Bendung Tapau serta jaringan irigasi. Perencanaan pengembangannya memerlukan pemutakhiran data yang konsisten antara batas historis SKP.A, batas administrasi desa, HPL, status kawasan hutan, dan delineasi RKT Bunguran Jaya. Profil ini menjadi dasar awal untuk melaksanakan verifikasi lapangan,

penguatan basis data spasial dan nonspasial, serta penentuan program pengembangan yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR SUMBER

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Rencana Penggunaan Lahan Usaha II SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3 Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ranai, 30 Desember 2024. Rujukan khusus SKP.A: bagian 2.3.1, halaman tercetak 36–38 dan tabel historis penduduk Januari 2024.
- Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Bunguran Jaya, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. 2025. Rujukan: tabel delineasi RKT, topografi/kemiringan, sistem lahan, jenis tanah, iklim, hidrologi, dan arahan pengembangan kawasan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025. Ranai, Februari 2025.
- Data dan uraian dalam dokumen ini harus diverifikasi terhadap dokumen resmi terbaru dari pemerintah daerah, pemerintah desa, BMKG, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.

Ranai, 05 Oktober 2025

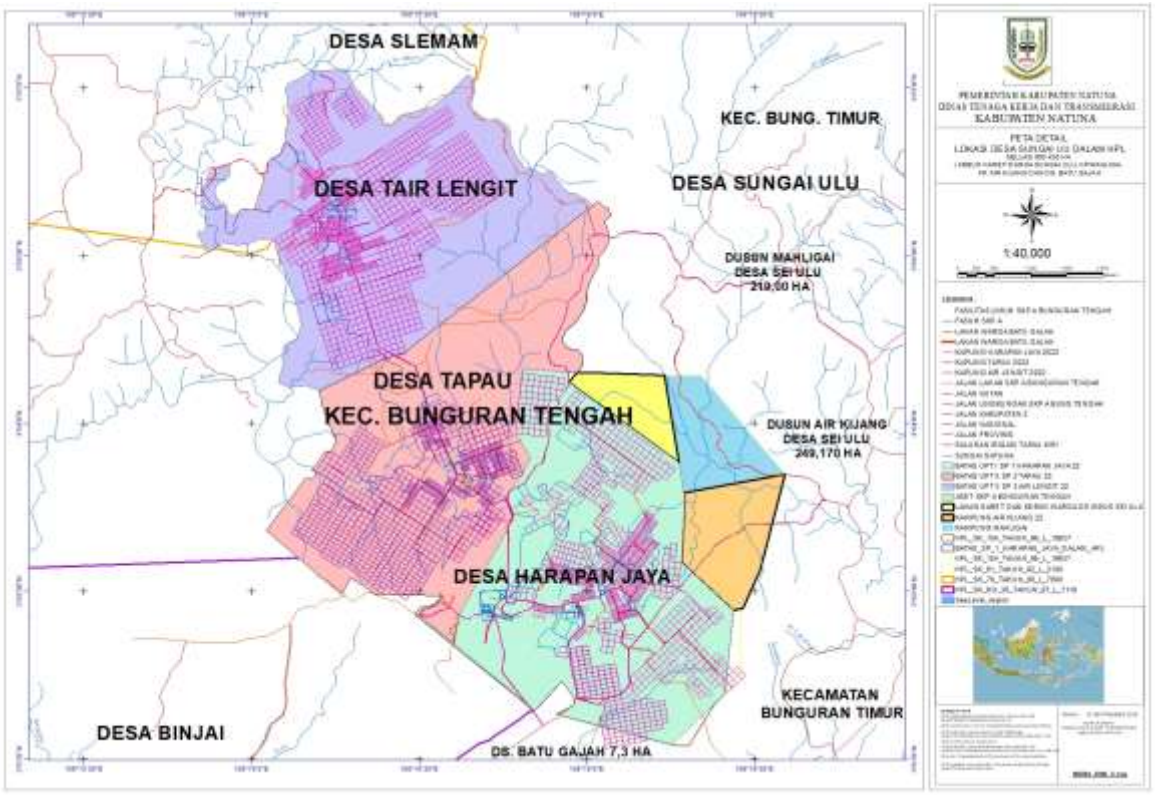
Kepala Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial
Peserta PKA XII BPSDM Kepri Tahun 2025

Kartono, SE
NIP.197211152006041009

Catatan

1. Dokumen ini hanya sebagai bacaan menegan kondisi dan bila ingin detail, harus dilakukan kajian secara mendalam.

PETA WILAYAH SKP. A BUNGURAN TENGAH



PETA SEBARAN PERMUKIMAN TRANSMIGRAS

